

PEMBACAAN HEGEMONI NEGARA TERHADAP PEMBENTUKAN KOMPETENSI SMP DALAM KURIKULUM 2013

READINGS OF STATE HEGEMONY TOWARDS THE ESTABLISHMENT OF COMPETENCE JUNIOR SECONDARY SCHOOLS IN THE CURRICULUM 2013

Aziz Riyanto

Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta

aziz.riyanto7@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui ideologi, kepentingan dan pembentukan kompetensi SMP Kurikulum 2013 berdasarkan pembacaan hegemoni dan *counter* hegemoni. Penelitian ini merupakan analisis wacana kritis Teun Van Dijk. Teknik analisis data meliputi jenjang teks, Jenjang kognisi sosial dan Jenjang Analisis sosial kemudian dielaborasi teori hegemoni Gramsci.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bertendensi ideologi eklektik dari liberalisme ke konservatif. Kepentingan terlihat mengisi struktur kelas, relasi kapitalisme sekaligus eskalasi pembangunan negara. *Common sense* sebagai pengakuan dan mendukung makna teks. Pembentukan Kompetensi dibawah kontrol negara dengan membangun wacana dominan, gradasi taksonomi pembelajaran, atomisme, metodologi ilmiah dan gerakan akuntabilitas. Dorongan juga dilakukan oleh *Partnership for 21st Century*, PISA dan TIMSS. Kompetensi SMP merupakan hegemoni negara melalui kekuatan material dan ide secara konsensus melibatkan varian ideologi pendidikan, kesadaran, wacana dominan dalam menafsirkan kenyataan. *Counter*-hegemoni melalui proses refleksi diri oleh pendidik dalam *hidden curriculum* serta pendidikan alternatif yang tidak diakomodir oleh kurikulum 2013.

Kata kunci : Kompetensi, Kurikulum 2013, Wacana dan Hegemoni

Abstract

This study aims to determine the ideology, interests and establishment of competencies Curriculum 2013 in junior secondary schools based on hegemonic readings and counter hegemony. This research is a critical discourse analysis form Teun Van Dijk. Data analysis techniques used text levels, Social cognition levels and Levels Social analysis then elaborated Gramsci's hegemonic theory.

The results show that the eclectic ideology tends from liberalism to conservative. Interest fill the class structure has a relationship of capitalism and the escalation of state development. Common sense is used recognition and supports the meaning text. Establishment competence under state control by constructing dominant discourse, gradation of taxonomy learning, atomism, scientific methodology and accountability movement. Encouragement is also given by Partnership for 21st Century, PISA and TIMSS. Competence is a state hegemony through material power and ideas by consensus involving variants of educational ideology, awareness, dominant discourse to interpreting reality. Counter-hegemony through the process of self-reflection by educators in the hidden curriculum and alternative education that is not accommodated by the curriculum 2013.

Keywords: Competency, Curriculum 2013, Discourse and Hegemony

PENDAHULUAN

Kurikulum 2013 diperkenalkan kepada publik Indonesia dan di implementasikan oleh pemangku kepentingan pendidikan. Klausul dokumen kurikulum 2013 menyiratkan acuan dasar kompetensi salah satunya berupa mengatasi bonus demografi 2025 dan mengejar target tujuh kekuatan negara ekonomi terbesar di dunia yang senantiasa dinarasikan oleh kekuatan dan kepentingan ideologi-ideologi dominan,

artinya pendidikan Indonesia akan senantiasa mengikuti setting negara atau konstruk dari kelompok tertentu untuk mencapai tujuan tersebut (Lampiran Permendikbud No 21 Tahun 2016). Implikasi tersebut dapat dicurigai memiliki ideologi dan kepentingan dalam relasinya dengan tatanan global saat ini yang menggeser kelas subordinat.

Kuasa dominasi negara pada Kurikulum 2013 diberlakukan dalam akses produksi seperti

kompetensi inti, kompetensi dasar, silabus, hingga pengetahuan, strategi pembelajaran dalam buku pegangan peserta didik dan pendidik. Otoritas sekolah hanya berupa penuntasan kompetensi dan pemenuhan berbagai kegiatan administratif sekolah. Hal ini menjadi tabu lantaran ditengah iklim demokrasi dan semangat otonomi, negara menjelma menjadi sumber otoritas kebenaran dan pengetahuan tunggal.

Seringkali kurikulum dibuat murni oleh mereka yang menganggap dirinya ahli tanpa mempertimbangkan pluralitas kehidupan murid, realitas dianggap sama dimana dan kapan saja proses ini jelas tidak demokratis dan tidak akomodatif (Nuryatno, 2011:8). Henry A Giroux menyatakan bahwa sekolah tidak berdaya dibawah kekuatan sosial, politik dan ekonomi serta sangat potensial melakukan penindasan dalam masyarakat kapitalis (Hidayat, 2013:72). Ini pertanda sekolah bukanlah subjek otonom tetapi sebagai objek dengan segala muatan kepentingan ideologis yang terdapat pada kompetensi.

Menurut Jimmy Paat (Listyarni, 2012:22) ada empat praktek yang mendominasi dalam pembelajaran di sekolah yaitu a) Hegemoni, b) dialog, c) pemerdekaan dan d) Lontar Masalah. Hegemoni dalam konsep pedagogie kritis, sekolah menjalankan berbagai nilai yang dimiliki dan dijalankan oleh kelompok tertentu yang mendominasi. Kepercayaan, ide-ide atau ideologi dominan disampaikan melalui kurikulum, peraturan-peraturan di sekolah, dan buku-buku pelajaran. Praktek dominasi kadang pula dapat dibenarkan jika mendapat dukungan lewat *common sense* dan legitimasi oleh peraturan.

Meminjam konsep hegemoni oleh Antonio Gramsci adalah “*a social condition in which all aspects of social reality are dominated by or supportive of a single class*” (Livingstone dalam Nuryatno, 2011:33). Hal ini memberi gambaran struktur produksi dan reproduksi kompetensi oleh kelompok dominan sehingga kelompok subordinat seperti pendidik mau

mengikuti kelompok tertentu. Proses hegemoni diyakini melibatkan penetrasi dan sosialisasi nilai, keyakinan, sikap dan moralitas yang dimediasi oleh praktek-praktek sosial, politik dan ideologi. Praktek ini juga harus dilihat sebagai counter hegemoni. Sebuah gagasan dan tindakan dalam meluluhkan pendidikan mapan.

Maka untuk fokus penelitian, kompetensi SMP dalam Kurikulum 2013 akan digali secara lebih dalam yaitu: Apa ideologi dan kepentingan yang dibawa Kompetensi SMP dalam Kurikulum 2013?, Bagaimana pembentukan kompetensi SMP dalam Kurikulum 2013?, Bagaimana konstruksi hegemoni pada kompetensi SMP dalam Kurikulum 2013 di masyarakat?, Bagaimana *Counter* hegemoni terhadap kompetensi SMP kurikulum 2013 bagi pendidik?.

Adapun tujuan dalam penelitian ini berupa mengetahui ideologi dan kepentingan pada kompetensi SMP dalam kurikulum 2013, mengetahui pembentukan kompetensi SMP kurikulum 2013, mengetahui tentang konstruksi hegemoni pada kompetensi SMP kurikulum 2013, mengetahui *counter* hegemoni yang dilakukan oleh pendidik.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis wacana dengan mengaplikasikan dan mengadaptasi analisis wacana kritis atau *Critical Discourse Analysis* (CDA) dari Teun A. Van Dijk. Menurut Jorgensen dan Philips (2007:114), CDA digunakan untuk melakukan kajian tentang hubungan-hubungan antara wacana dan perkembangan sosial dan kultur dalam domain-domain sosial. Tujuan dari analisis wacana kritis itu sendiri adalah menjelaskan dimensi linguistik-kewacanaan fenomena sosial, kultur dan proses perubahan dalam modernitas serta mengeksplorasi hubungan antara penggunaan bahasa dan praktik sosial.

Sumber Data Penelitian

Sumber data primer yang digunakan berupa produk perundangan berdasarkan keterkaitan dengan kompetensi SMP dalam Kurikulum 2013 diantaranya Permendikbud No 64 tahun 2013 tentang Standar Isi, Permendikbud No 68 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum SMP, Permendikbud No 58 tahun 2014 tentang Kurikulum SMP. Sedangkan data sekunder guna menunjang dan menelaah seperti buku, jurnal, artikel, makalah dan informan yaitu pendidik yang telah menggunakan kurikulum 2013 di SMP baik sekolah *pilot project* dan sekolah pengajuan negeri maupun swasta.

Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Pada Penelitian ini, Peneliti berperan sebagai instrumen kunci didasarkan pada kriteria-kriteria yang dipahami (Creswel, 2015:261). Kriteria yang dimaksud adalah pengetahuan tentang analisis wacana kritis. Peneliti dituntut memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Peneliti melakukan pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, yakni penulis menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, jurnal, dokumen tulis dan sebagainya (Creswell, 2015:270). Setelah itu, peneliti melakukan wawancara mendalam (*In-Depth Interview*) kepada informan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Validitas dan Reliabilitas Data

Analisis pada paradigma kritis mendasarkan diri pada penafsiran peneliti pada teks. Hal ini sangat berbeda ketika menggunakan paradigma positivistik yang menghindari penafsiran atau subjektivitas karena realitas dianggap ada, real, objektif dan tidak berubah. Dalam paradigma kritis, bukan dengan reliabilitas dan validitas mutu sebuah penelitian yang diukur, penelitian ini dipandang bagus jikalau peneliti mampu memperhatikan

konteks sosial, ekonomi, politik dan analisis komprehensif lain (Eriyanto, 2005:64).

Model Analisis Data

Ada dua aspek utama ketika akan melakukan kerja CDA, yaitu aspek makro versus mikro dan aspek kekuasaan sebagai kontrol. Pengguna bahasa, interaksi verbal, dan komunikasi adalah bagian dari level mikro. Sedangkan kekuasaan, dominasi, dan ketimpangan antar kelompok-kelompok sosial, adalah istilah yang merujuk pada level analisis makro. Untuk menganalisis dan menjembatani kesenjangan hubungan mikro-makro agar mencapai satu kesatuan analisis kritis atau yang disebut level meso diperlukan analisis tindakan-proses berupa tindakan para aktor, analisis pola hubungan kontrol dan struktur sosial, analisis personal dan kognisi sosial.

Adapun model analisis wacana kritis yang dikembangkan oleh Teun Van Dijk adalah jenjang teks, kognisi sosial dan Analisis sosial. Inti analisis adalah menggabungkan ketiga dimensi wacana tersebut kedalam satu kesatuan analisis. Dimensi Teks, suatu teks terdiri atas beberapa struktur/tingkatan yang masing-masing saling mendukung dan membaginya kedalam tiga tingkatan dalam satu kesatuan yaitu struktur makro merupakan makna global/umum dari suatu teks, superstruktur merupakan struktur wacana yang berhubungan dengan kerangka suatu teks, dan struktur mikro merupakan makna wacana yang dapat diamati dari bagian kecil dari suatu teks meliputi semantik, sintaksis, stilistik, retorik (Eriyanto, 2005:226).

Dimensi Kognisi Sosial, Para pengguna bahasa sebagai aktor sosial mempunyai kepribadian dan kognisi sosial (ingatan personal, pengetahuan, dan pendapat) sekaligus secara sosial disebarkan oleh anggota kelompok mereka sebagai ekspresi kebudayaan secara keseluruhan. Jadi, pendekatan sosiokognitif menguji struktur sosial kekuasaan melalui analisis hubungan antara wacana dan kognisi.

Dimensi Analisis Sosial, wacana dimaknai bagian dari interaksi masyarakat, sehingga untuk meneliti perlu dilakukan bagaimana wacana tentang suatu hal direproduksi atau dikonstruksi dalam struktur masyarakat. Dalam analisis ini ada dua poin penting yaitu kekuasaan (*power*) dan akses (*access*) (Eriyanto, 2005:271).

Tahapan Kerja Analisis

Dalam penelitian ini akan melakukan tahapan-tahapan analisis teks sebagai berikut:

1. Jenjang Analisis Teks.

Peneliti melakukan analisis terhadap makna penggunaan kata dalam lampiran sumber data primer. Semua data dipercayai mencerminkan kepentingan dan kerangka ideologi. Secara kualitatif, peneliti akan berinteraksi dengan teks dengan cara membaca teks dan memaknai teks berdasarkan struktur makro, suprastruktur dan struktur mikro.

2. Jenjang Kognisi Sosial.

Pada jenjang ini peneliti akan menganalisis representasi, tindakan, peristiwa dan strategi yang digunakan oleh aktor dalam membentuk wacana kompetensi SMP dalam Kurtilas. Peneliti akan mengumpulkan data, teori dan literature penunjang untuk mendapatkan informasi mengenai proses pembentukan Kompetensi.

3. Jenjang Analisis Sosial

Pada jenjang ini peneliti akan menganalisis konstruksi wacana yang berkembang di struktur masyarakat tentang kompetensi SMP Kurtilas. Jenjang ini juga mengilustrasikan pada kekuasaan (*power*) dan akses (*access*) kelompok tertentu kepada pendidik selaku pengguna. Peneliti akan melakukan *in-depth Interview* kepada pendidik di sekolah *pilot project* SMP N 1 Sewon dan sekolah pengajuan SMP N 1 Pundong dan SMP Islam Prestasi Al Muftadi-ien di Kabupaten Bantul. Ketiga sekolah tersebut mewakili tahapan pelaksanaan kurikulum 2013.

Setelah peneliti mencari dan menemukan data yang didapat melalui tiga jenjang tersebut.

Selanjutnya peneliti mendeskripsikan temuan penelitian dan mengelaborasi dengan teori hegemoni dan *counter* hegemoni dari Gramsci serta implikasinya terhadap kajian teknologi pendidikan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

1. Ideologi dan kepentingan yang dibawa pada Kompetensi SMP dalam Kurikulum 2013.

a. Tendensi menganut ideologi pendidikan eklektik dari liberalisme ke penguat konservatif.

Ideologi eklektik yaitu mengambil yang baik dari berbagai varian yang ada. Berangkat dari ideologi liberalisme metodis yang mengusung perbaikan-perbaikan masalah individu. Namun, juga menyuburkan ideologi konservatif berupa keyakinan-keyakinan yang sudah mapan, memperkuat pemikiran yang terpusat atau menanamkan kepatuhan mutlak.

b. Pengisian struktur kelas di setiap jenjang pendidikan.

Kompetensi sejatinya diambil dari gradasi taksonomi pembelajaran yang menuntut kriteria tertentu sesuai tingkat dan jenjang pendidikan. Taksonomi dapat dijadikan alat melahirkan struktur kelas. Sistem kurikulum ini akan menciptakan stratifikasi sosial dan dikotomi hubungan kelompok-kelompok yang akan menguasai kekuatan produksi sehingga pendidikan ikut mereproduksi struktur kelas.

c. Relasi ke Kapitalisme dan Developmentalis Negara.

Relasi kapitalisme pada kompetensi kurtilas ditujukan untuk mengkomoditi dan mengkomodifikasi berbagai sumber daya yang di atasnya masyarakat kapitalis dibangun melalui hubungan dan konsentrasi produksi. Sedangkan relasi developmentalisme negara kompetensi diarahkan mendayagunakan sumber daya untuk peningkatan produksi dan pasar sehingga berimbas pada eskalasi pembangunan diikuti kepatuhan pada lembaga negara.

d. Praanggapan dengan membawa ide-ide *common sense*.

Common Sense digunakan untuk mendukung makna suatu teks pada kurtilas. Ide diyakini dapat membawa implikasi perubahan individu seperti terampil, rasa ingin tahu, peduli, teliti, cermat, sabar, jujur, bertanggung jawab, kreatif, kritis dan kecemerlangan akademik serta implikasi perubahan sosial mencakup akselerasi atau percepatan pembelajaran, kebermanfaatannya pada masyarakat, masyarakat demokratis, keadilan, kemandirian ekonomi dan kelestarian budaya.

2. Pembentukan kompetensi SMP dalam Kurikulum 2013

Aktor yang terlibat adalah Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan Tim Pengembang Kurikulum dengan berbagai latar belakang profesi dibawah naungan Kementerian pendidikan dan Kebudayaan. Strategi yang digunakan berupa:

- a. Membangun wacana publik dari beberapa fenomena disertai alternatif pemegang otoritas seperti kepadatan materi keseimbangan dan penyalarsan kompetensi (Pengetahuan, sikap sosial, sikap spiritual dan keterampilan), degradasi moral melahirkan pendidikan karakter, ketidakproduktifan sumber daya manusia memunculkan pendidikan kewirausahaan, ketakutan akan krisis moneter dan lemahnya daya saing peningkatan ekonomi melahirkan pendidikan ekonomi kreatif.
- b. Menggunakan Teori Taksonomi pembelajaran sebagai gradasi pembentukan kompetensi seperti taksonomi struktur capaian belajar terobservasi (*Structure of The Observed Learning Outcomes (SOLO) Taxonomy*) oleh Collis and Biggs (1976), Taksonomi Bloom revisi Anderson dan Krathwol sebagai gradasi domain pengetahuan, Taksonomi Dyers sebagai gradasi domain keterampilan abstrak dan gradasi taksonomi Sympson untuk domain keterampilan konkrit serta taksonomi

Krathwol untuk domain sikap sosial dan spiritual.

- c. Menggunakan atomisme yaitu pemecahan tujuan umum atau perilaku kompleks menjadi satuan tindakan seragam dimana aktivitas manusia dan keilmuan bisa dipecah menjadi banyak sekali aktivitas khusus.
- d. Melandaskan populernya metodologi ilmiah dan gerakan akuntabilitas sebagai konteks historis. Ideologi pendidikan yang berkaitan dengan masalah kurikulum dan pembelajaran dapat diubah menjadi agenda politik berdasarkan agenda administrasi pemerintahan seperti konsep manajemen inovasi perusahaan Jeff Dyer menjadi kompetensi keterampilan kurtilas serta kalkulasi kepastian dan keberurutan pendidikan.

Aktor lain yang terlibat adalah *Partnership for 21st Century* atau P21 perintis kompetensi abad 21, *Program for international student Assessment (PISA)* sebuah anak organisasi dari *The organisation for economic Co-operation and Development (OECD)* dan *Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)* sebuah proyek riset dari *International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA)*. Organisasi ini juga beraliansi dengan perusahaan terkemuka dunia. Strategi mereka tidak secara langsung namun mampu memberikan dorongan akan arah wacana problematis berdasarkan hasil kajian dan rumusannya, serta menjadi rujukan Tim Pengembang Kurikulum atau media massa.

- a. Memberikan justifikasi ke pelaku pendidikan sebagai kemampuan global abad 21. rumusan kerangka oleh P21 mengajukan kurikulum berbasis kompetensi, *Higher order thinking skills* dan pendekatan berbasis masalah sebagai pembelajaran abad 21 memberikan justifikasi ke pelaku pendidikan.
- b. Menempatkan ketakutan akan mutu pendidikan berdasarkan penilaian komparasi antar negara yang membagi kedalam struktur kelas *low performance* dan *high performance* peserta didik. Peran TIMSS dan PISA adalah

juri pendidikan dunia, negara dengan ranking mutu pendidikan rendah diharuskan mengadopsi gradasi taksonomi dan materi pengetahuan kedalam bentuk kompetensi secara terukur untuk meningkatkan *performance* peserta didik.

3. Konstruksi Hegemoni pada Kompetensi SMP dalam Kurikulum 2013.

a. Hegemoni negara pada pendidikan Indonesia

Hegemoni negara ditandai dengan peran negara yang sangat kuat melalui kontrol produksi kompetensi kurtilas yaitu BSNP dan Kemendikbud serta memadukan kepemimpinan intelektual, moral dan filosofis yang masuk kedalam Tim Pengembang Kurikulum. Masyarakat kapitalis berkolaborasi dengan organisasi Partnership for 21st Century, OECD, PISA dan TIMSS menawarkan diagnosis dan solusi tentang berbagai masalah pendidikan. Realitas struktural kelas terdominasi yaitu sekolah dan pendidik telah menerima dan menyetujui dalam mempertahankan kepentingan hegemonik.

b. Konstruksi hegemoni pada kompetensi SMP dalam kurikulum 2013

Proses hegemoni bekerja dengan memadukan berbagai kekuatan material dan ide kedalam wadah aliansi melalui konsensus. Saluran ini melibatkan ideologi, *common sense*, wacana dominan dan nilai-nilai yang disebarkan secara sadar dan dapat meresap serta berperan dalam menafsirkan kenyataan. Kompetensi yang dibangun dari perbedaan varian ideologi pendidikan (eklektik) menjadi kesempatan dipersatukan satu wadah kurikulum nasional. Hegemoni mempergunakan *common sense* sebagai strategi kesadaran teoritis untuk memperebutkan penerimaan publik.

Kekuatan hegemoni juga digunakan kelas hegemonik untuk menciptakan cara berpikir atau wacana tertentu yang dominan, alat ini digunakan dalam merebut persepsi publik. Wacana mengenai fenomena negatif atau kebrokolan moral, buruknya skala penilaian internasional, eskalasi pertumbuhan ekonomi

kreatif, kepadatan materi serta ketidakseimbangan pengetahuan, sikap dan keterampilan menjadi pembahasan dominan ditataran kurikulum 2013. Sedangkan Blok historis adalah cara yang dilakukan memadukan kelas hegemonik melibatkan Pertama, masyarakat politik mempunyai wewenang membentuk kompetensi yaitu mana kriteria dan pengetahuan yang resmi bagi peserta didik. Kedua, masyarakat sipil yang terhimpun dalam Tim Pengembang kurikulum, mereka bertugas merumuskan hingga memasak kompetensi kurtilas dan mempercayakan teori taksonomi sebagai gradasi kompetensi peserta didik. Ketiga, masyarakat bidang produksi yaitu korporasi atau kelas pemodal dan peneliti membentuk aliansi organisasi yang menilai pendidikan antar negara sekaligus menawarkan alternatif dan standar seperti P21, PISA dan TIMSS.

Implikasi penelitian terhadap teknologi pendidikan sebagai kajian keilmuan, seringkali kompetensi hanya dipandang suksesi namun dibaliknya terdapat kontradiksi ideologis sehingga pengembangan teknologi pendidikan dapat mengalami hal yang bias dan paradoks. Implikasi pada tujuan teknologi pendidikan sesuai kawasan *facilitating learning* menekankan pemahaman bahwa pembelajaran dikontrol dan dimiliki oleh peserta didik bukan negara atau pula pendidik. Guru dan perancang dapat dan memang mempengaruhi pembelajaran, tetapi pengaruh itu bersifat fasilitatif bukan kausatif. Untuk itu, kontrol negara melalui pembentukan kompetensi dalam kurikulum 2013 sejatinya tidak mengarah pada orientasi membangun kesadaran kritis dan perubahan sosial.

Implikasi pada dimensi aktivitas teknologi pendidikan. Definisi AECT tahun 2004 terdapat dimensi aktivitas mengkreasi (*Creating*) dalam hal ini sebatas analisis dan refleksi kritis. Kajian hegemoni dapat melihat dominasi kompetensi yang dilandasi teori taksonomi pembelajaran sehingga dapat membungkam perspektif, teori dan tujuan pembelajaran lain. Keragaman perspektif dan teori pembelajaran ternyata dapat dilihat secara dialektik oleh aktor

atau kelompok tertentu untuk mengukuhkan kebenaran dan dukungannya. Sehingga, suatu syarat produk teknologi pembelajaran dapat diterima di masyarakat harus mampu mengakomodir kultur masyarakat. Kekuatan kelompok untuk mempengaruhi arah pendidikan juga diperlukan untuk mengesankan pendidikan berada dalam zona masalah melalui kajian riset permasalahan mendasar pendidikan diikuti persebaran media massa.

4. Counter Hegemoni terhadap Kompetensi SMP dalam Kurikulum 2013 bagi Pendidik.

Counter hegemoni adalah gagasan alternatif oleh kelas subordinat atau tertindas dalam mewujudkan transformasi sosial dan penanggulangan menahan arus kelas hegemonik. Kesempatan tersebut dapat terjadi melalui *hidden curriculum* atau kurikulum tersembunyi tentang relasinya antara kelas dan budaya oleh pendidik. Melalui proses refleksi diri (*self critics*) pendidik dapat menggunakan konsep ideologi sebagai kritik mempertanyakan asumsi pedagogies. Jalan lain adalah menawarkan pendidikan alternatif bagi masyarakat yang bertolak dari sudut pandang teori pembelajaran selain kurtilas seperti sekolah *Multiple Intelligence* pada SMP Islam Prestasi Al Mubtadi-ien.

Implikasi teknologi pendidikan terdapat pada kawasan managing atau pengelolaan. Teknologi pendidikan hendaknya tidak hanya sebagai fasilitator tetapi juga intelektual organik. Sumbangsih terletak bagaimana intelektual organik mampu memiliki pandangan yang berbeda dari konsep pendidikan mapan, mampu mengorganisir dalam praksis kerja sosial, serta mempunyai kontrol terhadap lapisan identitas masyarakat. Melalui kajian *counter* hegemoni terlihat infiltrasi yang dilakukan oleh negara akan senantiasa direduksi atau dibiarkan melalui *hidden curriculum*. Maka dimensi kawasan teknologi pendidikan yaitu *creating* melihat *hidden curriculum* sebagai analisis pemetaan perspektif dan refleksi pendidik untuk menghindari bias dan ilusi pembelajaran.

Melalui kajian kritis, Orientasi ketidakpercayaan pada *grand narrative*

modernitas pengembangan teknologi pendidikan maka akan terbukalah kepentingan kelompok tertentu yang sering kali menguntungkan dan memonopoli kelompok tertentu (Subkhan, 2016: 187). Hal ini membuka tabir secara teoritis kompetensi kurikulum 2013 menyumbang stratifikasi masyarakat dan upaya kelompok dominan yaitu negara, korporasi dan intelektual dengan meneguhkan standar tunggal baik itu kriteria dan pengetahuan resmi demi terciptanya masyarakat industri atau kapitalis.

Pembahasan

Dari uraian deskripsi dan hasil di atas, selanjutnya akan dilakukan pembahasan untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas dari data yang telah diperoleh:

1. Ideologi dan kepentingan yang terdapat pada Kompetensi SMP kurikulum 2013.

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap teks kompetensi kurtilas dengan menggunakan struktur makro (tematik), suprastruktur (struktur skematik), dan struktur mikro (semantik, sintaksis dan stilistik). Maka kepentingan dan ideologi yang didapat meliputi:

a. Tendensi menganut ideologi pendidikan eklektik dari liberalisme ke penguat konservatisme.

Tendensi menganut ideologi pendidikan eklektik dari liberalisme ke penguat konservatisme. Bagi Oneil Kurikulum berdasarkan kompetensi sejatinya diposisikan pada golongan liberal metodis, bentuk kompetensi kurtilas aliran ini kentara pada mata pelajaran Prakarya, Ilmu Pengetahuan alam, Bahasa Inggris dan sebagian Ilmu Pengetahuan Sosial. Misal jenjang elemen semantik latar mata pelajaran Prakarya menginginkan sumber daya manusia kreatif dan menemukan cara-cara baru dalam memecahkan masalah untuk menemukan solusi yang inovatif akibat persaingan ekonomi. Maka, bentuk Kompetensi Prakarya akan mengikuti dari narasi pada semantik berupa teks mengidentifikasi, membuat dan memodifikasi karya (kerajinan, rekayasa, budidaya dan pengolahan). Hasil karya disini dianggap cermin

manusia kreatif dan inovatif. Pada semantik Ilmu Pengetahuan Alam menginginkan manusia yang berpikir dan bersikap secara ilmiah melalui pemecahan masalah, kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan. Maka, bentuk isi Kompetensi Ilmu Pengetahuan Alam salah satunya berupa mengajukan pertanyaan, melaksanakan percobaan dan menyajikan hasil percobaan.

Namun metodologi yang diajukan kurikulum berdasarkan kompetensi bisa (setidak-tidaknya sesekali) berfungsi sebagai penguat konservatisme dalam pendidikan dimana mengorganisir kembali sasaran-sasaran pendidikan yang lama sehingga cenderung melestarikan yang sudah ada, atau status quo (Oneil, 2002:124). Misalnya Kompetensi pada pelajaran agama islam tampil sebagai pelestari dan keyakinan religius, mata pelajaran PPKN tampak menekankan kepatuhan hukum negara dan semangat empat pilar, mata pelajaran Bahasa Indonesia membawa intelektualisme atau kecakapan bahasa, mata pelajaran Seni Budaya menekankan kepekaan dan kesadaran seni budaya lokal dan PJKR mengelaborasi kepatuhan nilai dan permainan tradisional.

b. Pengisian struktur kelas di setiap jenjang pendidikan.

Tingkat Kompetensi yang digunakan pada Kurtilas merupakan pengadopsian dari hirarkie taksonomi struktur capaian belajar terobservasi dan taksonomi Bloom, Krathwol dan Dyers. Taksonomi merupakan alat melahirkan kelas atau dikotomi sesuai hirarkie jenjang yang ada seperti *low order thinking skill* (mengetahui, memahami, menerapkan) untuk mencukupi keterampilan para pekerja dan konsumen, sedangkan jenjang yang lebih atas pada *Higher order thinking skill* direalisasikan untuk pengembangan bisnis, pemimpin atau kelas atas. Mereka yang masuk pada kelas modern akan senantiasa tahu akan bagaimana menikmati surplus produksi dan pemimpin bagi tenaga kerja dan modal.

c. Relasi ke Kapitalisme dan Developmentalis Negara.

Relasi ke Kapitalisme dan Developmentalis Negara didapatkan fragmen pada struktur mikro Tema Pemecahan Masalah Sosial dan Konektivitas Ekonomi dalam Ruang mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, Mapel Ilmu Pengetahuan Alam dan Prakarya. Kedua mata pelajaran tersebut bertujuan mengeksplorasi berbagai sumber daya sekaligus mengkomoditi dan mengkomodifikasi. Hakikat komoditi itu sendiri terkandung gambaran tentang hubungan produksi yang di atasnya masyarakat kapitalis dibangun. Hal ini pendidikan juga ikut andil terlibat mereproduksi masyarakat kapitalis.

Melalui eksploitasi, komoditisasi dan komodifikasi diharapkan menyuplai berbagai kebutuhan antar daerah yang pada akhirnya dapat menunjang pembangunan nasional (Developmentalis). Diungkapkan oleh Anita Lie (Basis, 2005:14) dalam konteks pembangunan ekonomi di Indonesia, pendidikan nasional diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan pasar kerja. Peserta didik dianggap dan diperlakukan sebagai “sumber daya” yang sama dengan sumber daya lainnya sebagai pelengkap pembangunan nasional.

d. Praanggapan dengan membawa ide-ide *common sense*.

Elemen praanggapan (*Preupposition*) merupakan pernyataan yang digunakan untuk mendukung makna suatu teks, praanggapan umumnya didasarkan pada ide *common sense* yang masuk akal atau logis sehingga meskipun kenyataannya tidak ada (belum terjadi) tidak dipertanyakan kebenarannya (Eriyanto, 2009:257). Pada elemen struktur mikro didapatkan pranggapan. Kurikulum 2013 dinyakini membawa implikasi perubahan individu juga membawa perubahan sosial seperti Peserta didik dapat amanah, jujur, cerdas, tanggung jawab, teliti, cermat, sabar, kritis, kreatif, jujur dan komunikatif, pemenuhan kebutuhan dan *problem solver* serta muncul kehidupan harmonis, sejahtera, kepribadian positif, kemandirian ekonomi, kelestarian

budaya, nasionalisme, Patriotisme dan kebermanfaatannya.

2. Pembentukan kompetensi SMP dalam Kurikulum 2013.

Perihal Kompetensi dalam kurtilas, Otoritas yang berwenang adalah Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Kemunculan kurtilas juga diperbantukan oleh Tim Pengembang Kurikulum yang dibentuk oleh kementerian pada tahun 2013 melalui Kepmen nomor 015/P/2013, Tim ini beranggotakan dari berbagai profesi di masyarakat. Aktor lain yang terlibat adalah *Partnership for 21st Century* perintis kompetensi abad 21, PISA sebuah anak organisasi dari OECD dan TIMSS sebuah proyek riset dari IEA. Strategi yang digunakan BSNP dan Tim Pengembang Kurikulum

Sebelum membangun kompetensi, memasukkan sebuah persepsi publik merupakan bagian sebagai landasan dan alasan dimunculkannya kurtilas. Persepsi yang dibangun pendidikan terlalu menitikberatkan pada kognitif, kepadatan materi, kompetensi yang terpisah-pisah dan kurang bermuatan karakter. Tema lain berkaitan implikasi dengan kewirausahaan, ekonomi kreatif dan pembangunan melalui cara berpikir ilmiah. Menurut Van Dijk ini merupakan bagian dari model penyimpulan berhubungan dengan bagaimana realitas kompleks dipahami dan ditampilkan secara sederhana dan ringkas (Eriyanto, 2009:269).

Ide pokok berasal dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional (Renstra Kemendiknas) 2010-2014. Terdapat beberapa dalih kenapa mengusung hal tersebut pertama degradasi moral, kedua Persoalan pengangguran terdidik dan tidakproduktifan sumber daya manusia, ketiga ketakutan akan krisis moneter

dan lemahnya daya saing dan peningkatan ekonomi (Renstra Kemdiknas 2010: 42-49).

Penyelarasan ranah pengetahuan, keterampilan dan sikap dimunculkan lagi pada kurtilas akibat selama ini tidak ada sinkronisasi dan akomodir ketiga ranah tersebut. Perdebatan tentang padatnya materi (kognitif) juga telah terbentuk sekian lama semenjak tahun 1985. Perihal mengenai padatnya materi sejatinya belum pernah selesai di setiap periodisasi kurikulum.

Setelah membangun persepsi publik, strategi selanjutnya yaitu proses seleksi berupa berbagai sumber, teori dan model yang ditampilkan untuk membentuk kompetensi kurtilas dan proses reproduksi berhubungan dengan penggandaan dan penghilangan (Eriyanto, 2009:269). Model kurikulum berbasis kompetensi adalah strategi yang dipilih dibandingkan dengan model kurikulum berbasis konten dan kurikulum campuran. Untuk mengidentifikasi pengetahuan sesuai jenjang pendidikan digunakan Taksonomi struktur capaian belajar terobservasi oleh Collis and Biggs: 1976 kemudian dilengkapi Taksonomi Bloom revisi Anderson dan Krathwol untuk domain pengetahuan, Taksonomi Dyers untuk domain keterampilan abstraks dan gradasi Sympson untuk domain keterampilan konkrit serta taksonomi Krathwol untuk domain sikap.

Strategi reproduksi meliputi penggunaan taksonomi struktur capaian belajar terobservasi dari John B. Biggs dan Kevin F. Collis dari University of Newcastle dan Universitas of Tasmania. Didalam standar isi nomer 64 tahun 2013 menjelaskan jenjang SMP diletakkan pada tingkat 4 dan 4A pada kategori *extended abstract* akan tetapi menurut Biggs dan Collis usia 13 sampai 15 pada SMP seharusnya masuk tahap relational yaitu ranah berpikir deduktif dimana mampu menggeneralisasi konteks pengalaman dengan keterkaitan antar aspek. *Relational* dihilangkan dengan memasukkan *extended abstract* ke seumuran SMP (Collis and Biggs: 1982:24).

Michael Stephen Schiro, kompetensi adalah esensi dari pendukung kurikulum efisiensi sosial (Schiro, 2017:6). Kurikulum Efisiensi sosial percaya sifat pembelajaran adalah atomisme yaitu pemecahan tujuan umum atau perilaku kompleks menjadi satuan tindakan seragam, mereka harus memperlakukan perilaku yang dirumuskan menjadi menjadi tujuan akhir sebagai rangkaian tindakan yang saling bergantung yang jumlahnya menyusun perilaku yang lengkap artinya aktivitas manusia bisa dipecah menjadi banyak sekali aktivitas khusus (Schiro, 2017:96-102). Hal ini seperti pada kompetensi generik yang dipecah kedalam kompetensi spesifik, kompetensi inti yang dipecah kedalam kompetensi dasar ke indikator pencapaian kompetensi.

Konteks historis dari munculnya pendukung ideologi efisiensi sosial salah satunya populernya “metodologi ilmiah” mengacu pada sekumpulan teknik seperti statistika, ukuran yang akurat, analisis tugas, perekayasa efisien dan manajemen industri. Hal ini mengundang gerakan akuntabilitas dan gerakan standar dengan ide fundamentalnya “sains yang baik akan menciptakan sekolah yang baik pula” akibat derasnya perkembangan sains dan teknologi didunia (St Pierre dalam Schiro, 2017:109). Gerakan akuntabilitas memberi contoh bagaimana ideologi pendidikan yang berkaitan dengan masalah kurikulum dan pembelajaran dapat diubah menjadi agenda politik berdasarkan agenda administrasi pemerintahan (Schiro, 2017:111). Langkah ini sesuai dengan slogan populer “pendekatan saintifik” dari hirarkie taksonomi Dyers diambil buku *The Innovators DNA* tentang 5 keterampilan inovator yang hasil risetnya merupakan hasil metode telaah observasi dan interview para eksekutif perusahaan. Pada dasarnya gerakan menekan kerumitan-kerumitan dan ketidakpastian manusia dalam pendidikan ditanggulangi dengan proses keberurutan dan ukuran yang akurat dan pasti serta objektif.

Peran P21, PISA dan TIMSS

P21 didirikan tahun 2002 sebuah koalisi bersama antara komunitas bisnis, para pemimpin pendidikan dan pembuat kebijakan untuk kesiapan abad ke 21 yang dipusatkan untuk pendidikan Amerika K-12 serta memulai wacana nasional akan pentingnya kemampuan abad 21. Posisi P21 layaknya sebuah koalisi yang memikirkan kesiapan abad 21 dengan menyertakan berbagai organisasi termasuk lembaga negara, yayasan, lembaga non-profit hingga korporasi (P21, Our History, 2018). Beberapa kali Tim pengembang kurikulum mengemukakan bahwa kurtilas dikembangkan dari kebutuhan kompetensi abad 21.

PISA adalah program standar komparasi terkait kajian penilaian skala internasional yang dijalankan secara periodik dengan mengikutsertakan partisipasi negara dan anggota asosiasi dari OECD. Sejak berdiri secara administratif pada 1999 dan melakukan publikasi secara berkala dimana menilai tiga basis kompetensi akademik yaitu pemahaman membaca, kompetensi matematika dan kompetensi ilmiah. Penilaian ini melibatkan lebih dari 500 ribu peserta didik umur 15 tahun kedalam bentuk perankingan yang merepresentasikan populasi 28 juta orang muda dari 65 negara yang berpartisipasi (Fernandez-Cano, 2016:1-2).

TIMSS sebuah proyek riset dari IEA. Tujuan dari TIMSS tak lain sebagai lembaga jasa riset untuk meningkatkan kemampuan matematika dan sains. Hasil kajiannya merupakan bentuk penilaian dan perankingan yang melibatkan lebih dari 60 negara di publikasikan setiap empat tahun sekali serta komparasi sistem pendidikan, kurikulum dan praktik pendidikan antar negara. TIMSS memang mempunyai keyakinan deterministik bahwa peningkatan kompetensi matematika dan sains berimplikasi pada kehidupan yang lebih baik tentang kebijakan personal dan publik terutama berkaitan ekonomi dan lingkungan (Mullis, 2009:7).

Strategi P21, PISA dan TIMSS.

Framing penamaan kompetensi abad 21 oleh koalisi P21 akan lebih menyakinkan publik seakan standar inilah yang harus dipakai dan terbaik di abad sekarang. Kerangka pembelajaran abad 21 terdiri atas dua elemen yaitu *Student Outcome* dan *Support System*. Bait *Support System* mengatakan “fokus menyiapkan kesempatan untuk menerapkan kemampuan abad ke 21 lintas konten area dan pendekatan berbasis kompetensi bagi pembelajaran” (P21, 2015). Hal ini memberikan justifikasi kepada pelaku pendidikan untuk menerapkan secara universal pendekatan berbasis kompetensi dibandingkan berbasis konten atau campuran. Kemudian Instrumen P21 lainnya mengungkapkan “membolehkan metode pembelajaran inovatif yang terintegrasi penggunaan teknologi, pendekatan berbasis masalah dan inkuiri serta *Higher order thinking skills*” (P21, 2015).

Strategi TIMSS dan PISA sejatinya seperti juri menempatkan penilaian antar negara yang membagi kedalam *low performance* dan *high performance*. Kegagalan pendidikan membuat negara bertujuan meningkatkan kedalam *high performance* atau diatas rata-rata TIMSS dan PISA. Caranya dengan mengadopsi penggunaan gradasi taksonomi dan materi pengetahuan kedalam bentuk kompetensi, bagaimanapun instrumen penilaian juga bertolak dari tahapan berpikir objektif.

Kerangka Penilaian TIMSS pada matematika dan sains terdiri atas *fourth grade* dan *eighth grade*. Masing-masing *grade* mengorganisasikan dan mengelaborasi sekitar dua dimensi yaitu dimensi konten yang dispesifikkan lagi menjadi subjek materi (angka, aljabar, geometri dan data) dan dimensi kognitif yang dispesifikkan kedalam domain atau tahapan berpikir objektif (Memahami, menerapkan dan menganalisis) (Mullis, 2009:19-20). Hasil penilaian TIMSS yang menempatkan peringkat bawah Indonesia yang dinyakini pengembang kurikulum bahwa mayoritas peserta didik tidak mampu berpikir ke tahapan yang lebih tinggi (dimensi kognitif) dan sebagian konten materi

yang belum diajarkan (dimensi konten). Relasi kerangka penilaian TIMSS mempunyai kesamaan dalam pembentukan kompetensi kurtilas dimana menggunakan tahapan berpikir objektif (taksonomi) sebagai spesifikasi dan penyelarasan konten materi.

3. Konstruksi hegemoni terhadap Kompetensi SMP dalam Kurikulum 2013.

a. Hegemoni negara pada pendidikan di Indonesia

Hegemoni negara ditandai dengan peran negara yang sangat kuat dalam proses kontrol produksi kurtilas termasuk kompetensi, sebagaimana yang dijelaskan dalam kajian peran dan strategi pembentukan kompetensi kurtilas.

Hegemoni negara memadukan kepemimpinan intelektual, moral dan filosofis pada Tim Pengembang Kurikulum. Berbagai tokoh dari mulai teknokrat, praktisi, akademisi, budayawan hingga aktivis masuk dalam Tim pemroses penggodokan kurtilas. Perpaduan dari lintas kalangan ini dapat dijadikan persetujuan secara populis selain untuk merangkum berbagai pandangan.

Peran negara juga tidak sendirian tetapi juga mendapat pengaruh dari organisasi internasional seperti Partnership for 21st Century, OECD, PISA dan TIMSS yang berkoalisi dengan korporasi baik segi finansial, ide dan gagasan. Masyarakat kapitalis yang menjelma jadi organisasi ini menawarkan diagnosis dan solusi tentang berbagai masalah pendidikan berupa pasar neoliberal dan profesionalisme kelas menengah.

Adanya realitas memperlihatkan praktik kompetensi kurikulum oleh kelas terdominasi, sekolah dan pendidik tengah berjibaku dalam mempertahankan kepentingan hegemonik. Kata “guru tinggal menjalankan” membuktikan pendidik menjadi alat mempromosikan berbagai kepentingan dan ideologi walaupun sedikit disertai berbagai kritik metodologis namun nihil kritik ideologi. Hal ini sejatinya pendidik dari dulu semata-mata dijadikan objek atau alat negara dalam hubungannya antara kurikulum dengan kekuasaan.

Bagi Gramsci sekolah sebagai organisasi masyarakat sipil karena hubungan non koersif dimana konsensus itu berlangsung namun terdapat unsur koersif yang signifikan atas intervensi negara (masyarakat politik). Upaya intervensi negara melalui saluran perundangan beserta unsur derivatif yang mengharuskan sekolah berkiblat pada kompetensi kurtilas. Namun upaya ini senantiasa disertai prinsip demokrasi dimana sekolah harus memiliki pengetahuan melalui agenda sosialisasi dan hak untuk mengajukan dari kesempatan yang ada berdasarkan kesiapan sekolah. Sekolah sebagai organisasi masyarakat sipil (non koersif), tidak memaksakan sesuai kehendak negara seperti yang tercantum unit analisis sosial karena pandangan, akomodasi perbedaan kecerdasan dan kepribadian peserta didik serta konteks sosial wilayah masing-masing. Hal ini menegaskan sekolah sebagai masyarakat sipil dan politik.

b. Strategi hegemoni dalam pembentukan kompetensi kurikulum 2013

Proses hegemoni bekerja dengan memadukan berbagai kekuatan material dan idea kedalam bentuk aliansi melalui konsensus. Saluran ini melibatkan ideologi, *common sense*, wacana dominan dan nilai-nilai yang disebarkan secara sadar dan dapat meresap serta berperan dalam menafsirkan kenyataan. Bagi Gramsci (Simon, 2004:87), ideologi tidak bisa dinilai dari kebenaran atau kesalahannya tetapi harus dinilai dari kemanjurannya dalam mengikat berbagai kelompok sosial yang berbeda-beda kedalam satu wadah. Kompetensi yang dibangun dari eklektik sangat efektif dalam mengikat berbagai pandangan yang berbeda. Maka, kompetensi menjadi rasa religius dan moralis dengan menanamkan kepatuhan mutlak atas keyakinan-keyakinan yang sudah mapan.

Pandangan lain Gramsci yaitu mengenai pemikiran awam atau *common sense*, yang membedakan kedalam dua kesadaran teroris pertama kesadaran bersifat implisit dalam aktivitasnya menyatu dengan transformasi dunia nyata yang bersifat praktis, dan kedua bersifat eksplisit atau verbal yang diwarisi manusia dari

masa lampau (Simon, 2004:92). Kelompok dominan mempergunakan *common sense* sebagai strategi untuk memperebutkan penerimaan publik. Suatu keniscayaan mengingkari *common sense* karena berangkat dari hakikat pengetahuan dan kepercayaan yang ada. Jika ide atau gagasan ini diterima, maka hegemoni telah terjadi. Misalnya kesadaran bersifat eksplisit atau verbal, pengetahuan umum nilai jujur, sopan, disiplin dan bertanggung jawab adalah pokok nilai yang harus diperkuat dan telah menjadi ritual dalam masyarakat. Selain itu, kesadaran bersifat implisit seperti pengetahuan umum tentang kemandirian ekonomi adalah persoalan personal bukan sosial. Perilaku yang ditunjukkan melalui kreatifitas, inovatif dan wirausaha adalah fungsi dari tindakan individu lebih dari ketimpangan ekonomi.

Salah satu kekuatan hegemoni adalah bagaimana menciptakan cara berpikir atau wacana tertentu yang dominan, yang dianggap benar sementara wacana lain dianggap salah. Analisis sosial menunjukkan kalau wacana dominan sebagian diterima oleh kalangan pendidik terutama fenomena negatif namun sebagian mempertanyakan indikator dan sudut pandang historis. Perihal kepadatan materi juga ditampilkan setiap pergantian kurikulum dimana persoalan ini belum selesai hingga sekarang. Apresiasi kurtilas karena kejelasan ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan.

Blok historis adalah cara yang dilakukan kelas hegemonik dalam memadukan kepemimpinan dari suatu kelompok kekuatan sosial dalam masyarakat sipil dengan kepemimpinan dalam bidang produksi (Simon, 2004:29). Pertama, masyarakat politik sebagai bagian dari lembaga negara, BSNP beserta pejabat struktural kementerian pendidikan dasar. Kedua, Perpaduan masyarakat sipil yang terhimpun dalam Tim Pengembang kurikulum, bertugas merumuskan hingga memasak kompetensi kurtilas. Ketiga, masyarakat bidang produksi yaitu raksasa industri yang dipegang oleh pemodal melibatkan para akademi untuk membentuk organisasi yang menilai pendidikan

antar negara sekaligus menawarkan alternatif dan standar seperti P21, PISA dibawah naungan OECD dan TIMSS naungan IEA.

Hasil dari pembacaan hegemoni ini dapat mengacu tiga lokus utama teknologi pendidikan yaitu: Implikasi terhadap status bidang keilmuan, tujuan dan dimensi aktivitas teknologi pendidikan. Hal ini dapat menunjukan teknologi pendidikan memiliki keragaman paradigma dan sebagai bidang kajian keilmuan (*field of study*) yang dibangun oleh banyak bidang keilmuan seperti pada definisi AECT tahun 2004.

Implikasi penelitian terhadap teknologi pendidikan sebagai bidang keilmuan. Karakter eklektik kompetensi dalam kurikulum 2013 menunjukan tidak hanya dibangun atas permasalahan yang dialami individu (Liberalisme) juga dibangun untuk melanggengkan lembaga keilmuan mapan melalui penguasaan pengetahuan materi yang telah ada (konservatif). Hal ini dapat memunculkan kontradiksi ideologis mengenai arah kompetensi sehingga produk teknologi pendidikan akan mengalami hal yang bias dan paradoks. Di satu sisi peserta didik melakukan pemaknaan pengetahuan didalam subjektivitas melalui iklim demokrasi, disisi lain peserta didik juga melakukan objektivikasi pengetahuan bahkan tidak diperkenankan melakukan kritik pengetahuan dan nilai-nilai mapan.

Implikasi pada tujuan teknologi pendidikan. Asumsi yang dibangun kurikulum 2013 adalah aktivitas pembelajaran harus memiliki garis linear dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan dalam kompetensi, oleh karenanya untuk memastikan peserta didik tetap berada pada apa yang sudah tergariskan maka proses pembelajaran perlu dikontrol secara ketat. Menerima, menjalankan, mengetahui, memahami, mengamati dan menanya merupakan aktivitas pembelajaran yang sudah ditentukan dalam kompetensi. Secara konseptual standarisasi, generalisasi dan penyingkatan durasi aktivitas belajar sudah bertentangan dengan paradigma konstruktivistik, kritis dan

postmodern yang berorientasi keragaman, fleksibel dan kontekstual (Subkhan, 2016:118).

Implikasi pada dimensi aktivitas teknologi pendidikan. Definisi AECT tahun 2004 terdapat dimensi aktivitas mengkreasikan (*Creating*). Kajian hegemoni dapat melihat perspektif dan teori pembelajaran ternyata dilihat secara dialektik oleh aktor atau kelompok tertentu untuk mengukuhkan kebenaran dan dukungannya sehingga menjawab kemacetan pada aneka ragam perspektif dan teori pembelajaran. Suatu syarat perspektif dan produk teknologi pembelajaran baik itu corak behavioristik, kognitif, humanistik, dan konstruktivistik dapat diterima di masyarakat terkhusus sekolah harus mampu mengakomodir identitas masyarakat seperti moralitas dan religiusitas. Kekuatan kelompok untuk mempengaruhi arah pendidikan juga diperlukan untuk mengesankan pendidikan tidak sedang baik-baik saja melalui kajian riset permasalahan mendasar pendidikan diikuti persebaran media massa. Dengan ini pengembangan teknologi pendidikan dapat sebagai alternatif dapat diterima, disetujui dengan berkoalisi kelompok dalam masyarakat sipil.

4. Counter-hegemoni terhadap kompetensi SMP dalam kurikulum 2013 bagi pendidik

Pada analisis sosial, pendidik sebagai agen penyalur kompetensi yang ketat (rigid) seperti hanya mengajar di semua jenjang kelas SMP dengan jumlah mengajar yang padat. Relasi struktural ini peran pendidik bukan sebagai fasilitator dialog kritis. Namun sering kali pendidik acuh tak acuh terhadap distribusi kompetensi secara penuh. Maka kesempatan tersebut dapat menjadi alternatif *counter hegemoni* melalui *hidden curriculum* atau kurikulum tersembunyi tentang relasinya antara kelas dan budaya.

Bagi Henry Giroux konsep kurikulum tersembunyi sangat penting sebagai alat heuristik untuk mengungkap asumsi dan kepentingan yang masuk teruji dalam wacana dan bahan yang membentuk pengalaman sekolah kemudian dihubungkan dengan gagasan pembebasan dan

keadilan sosial. Melalui proses refleksi diri (*self critics*) pendidik dapat menggunakan konsep ideologi sebagai kritik mempertanyakan asumsi pedagogies mereka sendiri tentang pengetahuan, pembelajaran, prestasi, sifat manusia, objektivitas, relasi murid-guru dan pihak sekolah (Hidayat, 2013:87-88). Potensi refleksi diri ini dapat timbul seperti tutur ibu Tri Sutrisni mempertanyakan keniscayaan penuangan pengetahuan sebanyak-banyaknya melalui kompetensi yang dimana akan terbuang seharusnya mendasarkan kecerdasan masing-masing. Dalam pandangan Giroux pendidik adalah ahli kurikulum. Pendidik seharusnya aktif terlibat dalam memproduksi bahan kurikulum yang disesuaikan dengan konteks budaya dan sosial dimana mereka mengajar. (Hidayat, 2013:91).

Kontestasi *counter hegemoni* bisa dilacak dimana terdapat sekolah yang menawarkan pendidikan alternatif selain yang diberikan oleh negara. Peran ini terlihat pada unit analisis sosial yaitu sekolah swasta memiliki akses dalam perencanaan dan pelaksanaan kurikulum yang lebih besar seperti SMP Islam Prestasi Al Muftadi-ien yang bertolak dari studi teori kecerdasan majemuk Howard Gardner dan integrasi kultur pondok pesantren. Bagi Gramsci hubungan seperti ini menandakan masyarakat politik (koersif) dan masyarakat politik (non koersif) terjalin tidak secara tegas. Disisi lain negara melakukan tindakan koersif melalui kurtilas dan organisasi sekolah mengelaborasi dengan sudut pandang *multiple intelligence* dan kultur pesantren.

Perbedaan tersebut terjalin melalui nilai keyakinan dan aktivitas dalam pembelajaran seperti keyakinan peserta didik itu tidak bodoh, unik, menghargai semua kecerdasan sedangkan Kurtilas menuntut peserta didik memiliki kecerdasan yang sama (kesempatan), aktivitas atau pola pembelajaran didasarkan atas pemetaan belajar dari kecerdasan majemuk seperti visual, interpersonal dan kinestetik sedangkan aktivitas kurikulum 2013 didasarkan pada taksonomi pembelajaran seperti menerapkan, menanya,

menyajikan. Namun bila kompetensi dimaknai sebatas tujuan maka sejatinya SMP Islam Prestasi Al Muftadi-ien juga mengejar hal tersebut tetapi dielaborasi dengan kultur pesantren.

Ide *multiple intelligence* sebenarnya muncul dari tokoh intelektual organik Bapak Shobian kepala sekolah di tahun 2012 yang menjadi penggerak dan inisiator. Beliau menangkap bahwa *multiple intelligence* akan cocok di sekolah tersebut disisi lain negara sedang membangun hegemoni kurikulum 2013. Bagi Gramsci menyebut Intelektual organik sebagai orang yang mempunyai fungsi sebagai organisator atau penggerak dalam semua lapisan masyarakat (Simon, 2004:141). Dengan latar belakang aktivis beliau mempunyai gagasan yang berbeda dari pandangan mapan sehingga dapat menancapkan pondasi dan menularkan ke tokoh-tokoh yang lain. Namun gagasan intelektual belum cukup karena dibutuhkan kontrol atau kuasa pada tataran sekolah, hal ini terjadi ketika kekuasaan sedang goyah ketika pergantian kepemimpinan sehingga gagasan tersebut belum sempat ke tataran praktis.

Lembaga sekolah swasta memiliki akses dan kuasa yang berbeda dengan otoritas sekolah negeri dimana kurikulum dipandang kontruksi terpusat. Namun pandangan pedagogi kritis menginginkan lebih dari itu, pedagogi kritis berusaha pendidikan dapat menyediakan alat bagi individu untuk mengembangkan potensinya dan memperkuat demokrasi, serta mengembangkan masyarakat yang egaliter. Pedagogi kritis dapat menyebarkan pendidikan dalam sebuah proses perubahan sosial yang progresif (Hidayat, 2013:12-13).

Implikasi terhadap dimensi kawasan teknologi pendidikan yaitu *managing* atau pengelolaan. Relevansi hegemoni terhadap kompetensi kurikulum 2013 bagi teknolog pendidikan hendaknya tidak hanya sebagai fasilitator tetapi ditujukan sebagai penggerak perubahan sosial sebagaimana tokoh intelektual organik yang merekonstruksi selain konsep pendidikan mapan. Maka, dapat menjadi ulasan

redefinisi teknologi pendidikan tahun 2004 pada aktivitas pengelolaan personel (kepemimpinan) menggunakan kajian manajemen kritis yang sebelumnya bernuansa korporat. Sumbangsih terletak bagaimana intelektual mampu memiliki pandangan yang berbeda dari konsep pendidikan mapan, mampu mengorganisir dalam praksis kerja sosial, serta mempunyai kontrol terhadap lapisan identitas masyarakat.

Melalui kajian counter hegemoni terlihat infiltrasi yang dilakukan oleh negara akan senantiasa direduksi atau dibiarkan melalui cara pandang konsep dan praktik pembelajaran oleh pendidik. Bukan berarti pendidik tidak paham mengenai kurikulum 2013 dan kurang konsisten yang sering kali digolongkan kutub benar salah atau kutub profesional dan non profesional tetapi keanekaragaman perspektif dan refleksi dari pendidik yang dapat menjelma menjadi *hidden curriculum*. Kultur pendidik behavioristik akan berlawanan kultur konstruktivistik, kritis begitupun sebaliknya. Kontrol negara sering kali menganggap pendidik adalah objek yang dapat dikendalikan, mengikuti kehendak serta berusaha memerangi perspektif dan refleksi pendidik menjadi narasi tunggal. Akibatnya dapat menimbulkan ilusi dan pembiasaan aktivitas pembelajaran. Maka dimensi kawasan teknologi pendidikan *creating* melihat *hidden curriculum* sebagai analisis pemetaan perspektif dan kultur pendidik untuk menghindari bias dan ilusi pembelajaran.

Keterbatasan penelitian ini berupa interpretasi (penafsiran) dan pemaknaan peneliti, literasi pedagogi kritis yang minim dikalangan pendidik dan sekolah, hanya menginjakkan hubungan asimetris negara dan pendidik, beberapa teks dan konsep pada kompetensi tidak tercakup pembentukannya, adanya revisi kompetensi kurikulum 2013 secara periodik, dan implikasi terhadap kajian teknologi pendidikan lebih banyak berorientasi analisis dan refleksi kritis terkecuali implikasi pada kawasan pengelolaan teknologi pendidikan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ideologi dan kepentingan yang dibawa bertendensi ideologi eklektik dari liberalisme ke penguat konservatisme dimana tema tertentu mengusung perbaikan masalah individu sedangkan tema lain menekankan pemikiran konvergen dan kepatuhan. Kepentingan terlihat mengisi struktur kelas yang mempunyai relasi dengan kapitalisme sekaligus eskalasi pembangunan negara. Ide *common sense* digunakan sebagai pengakuan dan mendukung makna teks pada kurikulum.
2. Pembentukan Kompetensi SMP dalam Kurikulum 2013 dibawah kontrol Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan Tim Pengembang Kurikulum. Usaha yang dilakukan membangun wacana publik dominan dari beberapa fenomena disertai alternatif, menggunakan taksonomi pembelajaran sebagai gradasi aktivitas pada kompetensi, melibatkan atomisme, berlandaskan populernya metodologi ilmiah dan gerakan akuntabilitas. Dorongan juga diberikan oleh P21 berupa justifikasi pembelajaran abad 21, PISA dan TIMSS sebagai penilaian pendidikan antar negara.
3. Kompetensi kurikulum 2013 merupakan hegemoni negara dengan memadukan masyarakat sipil dan produksi. Realitas struktural kelas terdominasi pendidik telah menerima dan menyetujui dalam mempertahankan kepentingan hegemonik melalui kekuatan material dan ide secara konsensus. Saluran ini melibatkan varian ideologi, common sense, wacana dominan yang disebarkan secara sadar dan dapat meresap serta berperan dalam menafsirkan kenyataan.

Implikasi terhadap teknologi pendidikan sebagai kajian keilmuan terdapat kontradiksi ideologis mengenai arah kompetensi

menimbulkan bias dan paradoks. Sebagai tujuan menekankan pemahaman bahwa pembelajaran dikontrol dan dimiliki oleh peserta didik bukan negara atau pula pendidik. Sebagai aktivitas kawasan *Creating*, melihat meredamnya keanekaragaman perspektif, teori dan tujuan pembelajaran dan mensyaratkan untuk mengakomodir kultur masyarakat serta kekuatan kelompok demi mempengaruhi arah pendidikan sebagai alternatif.

4. Counter hegemoni terjadi melalui kurikulum tersembunyi yang dilakukan oleh pendidik melalui proses refleksi diri (*self critics*). Munculnya pendidikan alternatif yang bertolak dari sudut pandang teori pembelajaran yang tidak diakomodir oleh kurikulum 2013 dari tokoh intelektual organik.

Implikasi teknologi pendidikan pada kawasan *managing*, Teknolog pendidikan berperan sebagai intelektual organik dimana mempunyai pandangan yang berbeda dari konsep pendidikan mapan, mampu mengorganisir dalam praksis kerja sosial, serta mempunyai kontrol terhadap lapisan identitas masyarakat. Kawasan *creating* melihat *hidden curriculum* sebagai analisis pemetaan perspektif dan refleksi diri pendidik yang berorientasi keragaman dan menghindari bias pembelajaran

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Kompetensi SMP dalam kurikulum 2013 sebaiknya diorientasikan ke perbaikan masalah individu atau Ideologi liberalisme metodis untuk menghindari kontradiksi dalam penggunaan eklektik serta mengikis struktur kelas peserta didik sesuai keunikan dan kecerdasan masing-masing.
2. Menekankan kurikulum yang tidak hanya berbasis kompetensi seperti berbasis konten atau campuran berdasarkan konteks lokal dan

tatanan sosial serta menghindari anasir yang dilakukan oleh P21, TIMSS dan PISA.

3. Peran dominasi dan hegemoni negara menekankan bahwa pembelajaran dikontrol dan dimiliki oleh peserta didik sesuai dengan makna pengetahuan, potensi dan keinginannya.
4. Mendorong lebih banyak lagi pendidikan alternatif sehingga kaya akan keragaman.
5. Akademisi atau peneliti dapat melakukan studi lanjut hegemoni atau tema lain paradigma kritis.
6. Pengembang kurikulum dan teknologi pendidikan dapat menjadi tokoh intelektual organik yang mengorganisir dan mengajukan pendidikan alternatif, senantiasa melakukan analisis kritis serta bertumpu pada kebutuhan dan perhatian peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Basis. (2005). Guru bukan sekedar operator kurikulum. nomer 07-08 tahun ke 54. Hal 14-17
- Biggs, J. B & Collis, K. F. (1982). *Evaluating the Quality of Learning: The SOLO Taxonomy (Structure of the Observed Learning Outcome)*. New York: Academic Press.
- Creswell, John W. (2015). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dyer, J. Gregersen, H & Christensen, C. M. (2011). *The Innovator of DNA Mastering the five skills of Disruptive Innovators*. Boston: Harvard Business Review Press.
- Eriyanto. (2005). *Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: Lkis Yogyakarta.
- Fernandez-Cano, Antonio. May (2016). A Methodological Critique of the PISA Evaluations. RELIEVE, 22(1), art. M15. Diambil tanggal 5 April 2018 pada <http://dx.doi.org/10.7203/relieve.22.1.8806>
- Hidayat, R. (2013). *Pedagogi Kritis: Sejarah, Perkembangan dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo.

- Jorgensen, M.W. & Philips, L.J. (2007). *Analisis Wacana Teori & Metode*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kemendikbud. (2010). Peraturan Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014.
- Kemendikbud. (2013). Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 015/P/2013 tentang Tim Pengembangan Kurikulum pada Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Kemendikbud. (2013). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan dasar dan menengah.
- Kemendikbud. (2013). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
- Kemendikbud. (2014). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
- Kemendiknas. (2010). Sejarah Pusat Kurikulum. Jakarta: Pusat Kurikulum, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Nasional.
- Listyarni, R. (2012). *Pendidikan Karakter dalam Metode Aktif, Inovatif dan Kreatif*. Jakarta: Esensi Erlangga Group.
- Mullis, V.S. Inna. Etc. (2009). *TIMSS 2011 Assessment Frameworks*. Boston: TIMSS & PIRLS International Study Center Lynch School of Education, Boston College.
- Nuryatno, A. M. (2011). *Mazhab Pendidikan Kritis*. Sleman: Resist Book.
- Oneil, F. William. (2002). *Ideologi-Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- P21. (2015). P21 Framework Definitions. Diakses tanggal 5 April 2018 dari <http://www.p21.org/our-work/p21-framework>
- P21. (2018). The Partnership for 21st Century Learning: Our History. Diakses tanggal 5 April 2018 dari <http://www.p21.org/about-us/our-history>
- Presiden RI. (2013). Peraturan Pemerintah Nomor 32, Tahun 2013, Tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan.
- Subkhan, Edi. (2016). *Sejarah dan Paradigma Teknologi Pendidikan untuk Perubahan Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Schiro, S. Michael. (2017). *Teori Kurikulum: Visi-visi yang saling bertentangan dan kekhawatiran tanpa henti*. Jakarta: Indeks.
- Simon, R. (2004). *Gagasan Gagasan Politik Gramsci*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.